

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BATU PADA SAAT  
PANDEMI *COVID* – 19**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



**OLEH:**

**DEVI KUMALASARI**

**2018110041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2022**

## ABSTRAK

Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk melihat dampak pencerahan muatan mesin kendaraan terhadap konsistensi warga di Kota Batu semoga sukses dengan pandemi Covid-19. Eksplorasi ini adalah laporan kuantitatif yang diarahkan menggunakan strategi gambaran umum, yaitu pemeriksaan khusus yang mengambil contoh dari suatu populasi dan menggunakan survei sebagai instrumen pemilihan. informasi penting. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penghuni kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Batu pada tahun 2021. Dalam tinjauan ini, jumlah populasi adalah 14.771 unit kendaraan mekanik. Tes ujian yang dapat mengantarkan jumlah warga kendaraan mekanik di SAMSAT Kota Batu adalah 99, ditentukan dengan melihat resep slovin. Dilihat dari konsekuensi eksplorasi dan percakapan yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, cenderung beralasan bahwa pencerahan muatan mesin kendaraan bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini mempengaruhi konsistensi warga di Samsat Kota Batu.

**Kata Kunci : Pemutihan Pajak, Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Pandemi Covid – 19**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menjelang akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan apa yang disebut sebagai kasus pneumonia tanpa sebab yang jelas, dimana kasus tersebut bermula di kota Wuhan, China. China memikirkan tentang pneumonia pada 7 Januari 2020 saat ini satu lagi jenis Covid. Pernyataan "pemberitahuan tentang pengobatan pneumonia untuk alasan yang tidak jelas" telah diberikan oleh Komite Kesehatan Kota Wuhan. Penyebaran dan perkembangan kasus Virus Corona sangat cepat dan tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia (Suhendri dkk, 2022). Karena banyaknya kasus di berbagai negara menyebabkan kemerosotan moneter di berbagai daerah, sehingga rencana belanja negara terasa tertekan dan berkurang jumlah terbesar. Virus corona berdampak signifikan terhadap perekonomian (Suhendri et al. 2022). Dampak yang terjadi di Indonesia praktis di semua bidang, salah satunya adalah bidang ketetapan pajak. Karena efek ini, banyak pengaturan telah dibuat oleh otoritas publik untuk mengelola efek yang terjadi selama pandemi Covid-19 sehingga semua daerah yang dapat meningkat lagi dan laju perkembangannya kembali pada apa yang dibutuhkan oleh otoritas publik (Risnarningsih, dkk, 2022).

Dimana pengeluaran pendapatan signifikan meskipun ada pendapatan yang berbeda, khususnya pendapatan migas dan pendapatan non-beban. Retribusi sudah menyumbang 80 persen dari APBN. Otoritas publik secara konsisten

berusaha untuk memperluas tujuan penerimaan negara dari daerah tugas.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan meskipun memiliki pendapatan yang berbeda-beda, baik pendapatan migas tertentu maupun pendapatan non-beban. Retribusi merupakan pemasukan terbesar bagi negara. Selama ini retribusi sudah menyumbang 70-80 persen dari APBN. Otoritas publik terus berupaya membangun tujuan penerimaan negara dari wilayah penilaian. Pekerjaan pungutan sebagai pendapatan asli daerah ternyata belum menjadi warga yang layak. Sejujurnya, kerukunan masyarakat menuju perbaikan bebas membutuhkan komitmen. Semakin besar tanggung jawab individu mengenai biaya dalam pelaksanaan kemajuan. Kesadaran akan kewajiban ini merupakan nilai utama yang sedang dikembangkan dan diyakini konsistensi muatan dapat dipahami. (Sari, dkk. 2015).

Kebijakan Pemutihan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) umumnya disepakati mengingat keterbatasan moneter daerah setempat yang semakin menipis. Seperti diketahui, dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus ada pencegah yang pasti, misalnya angsuran retribusi kendaraan bermotor yang kemungkinan bea masuk dan persetujuan terhadap warga kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada warga negara yang terlambat membayar retribusi kendaraan bermotor berupa otorisasi manajerial berupa denda. Oleh karena itu, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini digunakan untuk menghilangkan. Angsuran retribusi kendaraan bermotor tidak terkena denda, masyarakat umum diharapkan membayar retribusi tepat waktu, mengingat kebutuhan anggaran pemerintah daerah terdekat untuk antisipasi dan penanganan wabah Covid-19 masih sangat tinggi. Pengecualian denda kendaraan bermotor adalah denda terhadap retribusi

kendaraan bermotor atas keterlambatan atau tidak terbayarnya utang retribusi kendaraan bermotor yang terutang.

Mengingat hal-hal di atas, para ahli akan melihat lebih dalam tentang kecerahan muatan mesin kendaraan, para ilmuwan menemukan dalam ulasan berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batu Pada Saat Pandemi *Covid – 19*”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Melihat landasan di atas, maka sangat baik dapat direncanakan isu Bagaimana Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan susunan masalah, justifikasi penajakan ini untuk membedah Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19...

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Mengingat target di atas, eksplorasi ini seharusnya bermanfaat untuk pertemuan yang berbeda:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara hipotesis, kelebihan kajian dalam makalah ini adalah dapat menjadi tulisan tambahan atau referensi dan tambahan informasi dan pengguna tentang ilmu keuangan, khususnya pembukuan.

### **2. Manfaat Praktisi**

#### **1) Manfaat bagi akademisi**

Bagi masyarakat yang mempercayai pemeriksaan tersebut dapat

memberikan tambahan data dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna sebagai sumber perspektif untuk kepentingan logis terkait dengan Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19.

2) Manfaat bagi pemerintah

Bagi otoritas publik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembuat strategi di Kota Batu dan dapat memberikan data yang asli terkait dengan Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19.

3) Manfaat Bagi Universitas

Sebagai data dan referensi bagi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa Akuntansi berkonsentrasi pada program yang berpendapat bahwa perlu dilakukan kajian tambahan mengenai Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Selama Masa Covid-19 pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Sanim, B., Harianto, & Djohar, S. (2011). Analisis Manfaat Pemutihan Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1).
- Alviansyah, Tri Palira. 2011. “Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Malang Utara)”.
- Apsari, N. D. D. (2012). Pengaruh Pemutihan Pajak Bbn Kb Terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Surabaya Barat. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1).
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915– 1926.
- Avidaniar Bintary, Abharina. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *JUPASI (Jurnal Pajak Vokasi)*, 1(2), 86–101.
- Azizah Aprilianti, Anti. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemutihan Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal ASSETS*, 11(1), 1–20.
- Atirah, S. & R. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islami Bagi Pengusaha Terhadap Pelanggan Di Toko Seragam Sekolah di Pusat Grosir Butung Makassar. *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, 2(1), 105–124.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan BermotoR. *JOM Fekon*, 3(1), 295–309.
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120.
- Bhakti Nur Avianto, „Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor“ (2020) 3 *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi*.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Carolina, Verani., Fortunata, Riana. 2013. “Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung

- Charistina Irwati Tanan, K. A. D. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura. *Journals of Economics Development Issues*, 4(1), 377–389.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *Jurnal At-Taquaddum*, 8(1), 21–46.
- Chau, Gerald dan Patrick Leung. 2009. A Critical Review Of Fischer Tax Compliane Model: A Research Synthesis. *Journal Accountng and Taxation Vol.1 (2)*. Hong Kong Polytechnic University. Hung Hom, Kowloon, Hongkong
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. 2020. „Pengaruh Pemutihan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19“. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9(2)
- Ferry & Sri. 2020. „Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang“. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis* 18(1):68–88.
- Feld, L. P. and Frey, B. S., (2007), “Tax Compliance as the Result of Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation”. Volume 29, Issue 1, *LAW & POLICY*.
- Halim, Abdul. 2004. *Management Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP
- Halim, Abdul., Icuk ,Rangga B., Amin, Dara. 2014. “Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus”. Jakarta : Penerbit Salemba.
- I Ketut Darma. (2021). Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(1), 986–999.
- Ida Ayu Nyoman Sri Anggreni, A., & Yuesti, D. A. S. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid “ 19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499–505.
- Indrawati & Setiawan W. 2009. *Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan pdf, e-book*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTKIPA).
- Istanto, Fery.2010. Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar



- Elin Dwi Mareti, Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019. Buku 2: Sosial dan Humaniora
- Fuadi,Oentari Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*,Vol 1.No1.2013.
- Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadidan Siti Ragil Handayani. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan*, Vol 9(1).
- Julianti, Murni. 2014. Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kartika dan Suntono. (2015). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak)”. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 4, No. 1
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Latief et al. 2020. „Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemutihan Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19“. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11(1):1–20.
- Leba. (2016). “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S., 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris

Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 6, No.3, Agustus 2017.

- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Rachmawati & Ramayanti. 2016. „Manfaat Pemberian Pemutihan Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak“. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 4(2):176–85.
- Risnarningsih, *et al.* 2022. Pengaruh Pembebasan Pajakumkm Terhadap Kinerja Usaha Pada Umkm Kelurahan Tlogomas Kota Malang Di Masa Pandemi *Covid-19*. *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN*. Vol 4, No 1 (2022)
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). *The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia)*, *European Journal of Business and Management*, 14 (6): 49 – 53.
- Suhendri, H, Nur Ida Iriani, Efriani Aswani Tanggu. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimasa Sebelum dan Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol.9, No.1, 2021. Hal 63-68.